

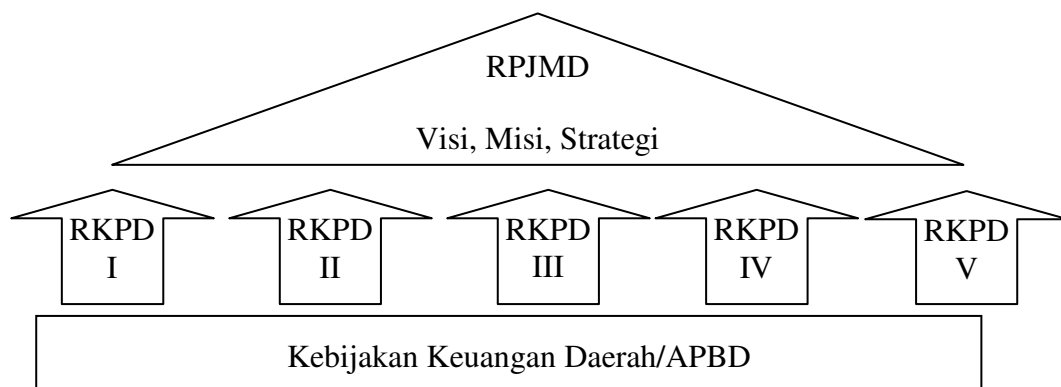
BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*)

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD dan laporan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya (dalam hal ini periode 2006 – 2010).

Hubungan antara dokumen perencanaan strategik dengan anggaran, dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 3.1
Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan Daerah/APBD
Dengan RKPD dan Visi, Misi, Strategi RPJMD

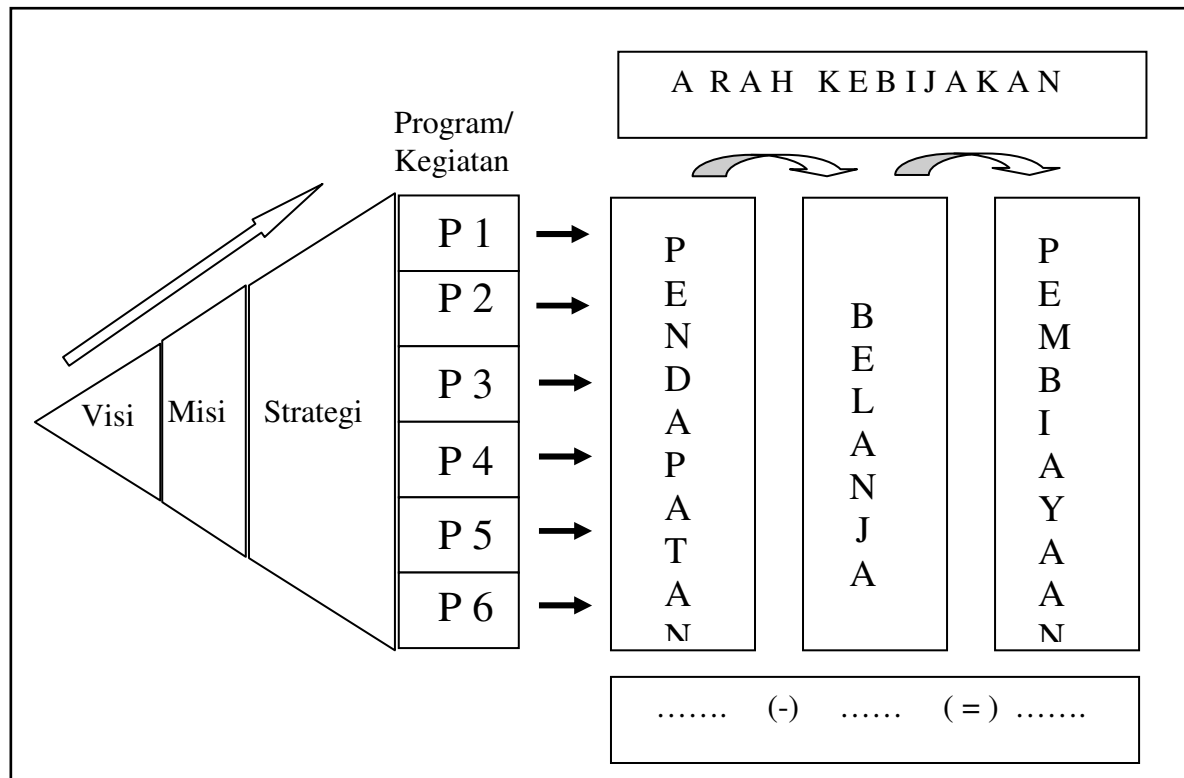
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD yang dituangkan

dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJMD, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun.

Arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Kabupaten Sragen mengandung makna bahwa :

- a. Arah belanja APBD Kabupaten Sragen digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas startegis jangka menengah, 5 tahunan ;
- b. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang sustansi dan dengan jumlah yang memadai.

Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda, maka kebijakan keuangan daerah juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut, meliputi kebijakan pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Adapun hubungan strategi dengan arah kebijakan komponen APBD dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 3.2
Kerangka Hubungan Antara Strategi dan Komponen APBD

Gambar diatas menunjukkan hubungan antara proses perencanaan kegiatan dengan keuangan. Satuan terkecil dari perencanaan strategik adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan, dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kabupaten Sragen, pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Belanja yang tidak strategik dan tidak memiliki nilai tambah (*no value added*) diminimalisir.

Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini harus diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh pemerintah Kabupaten Sragen.

Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/ defisit maka atas selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/ deficit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun

anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2006-2010 memberikan gambaran tren yang positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 13,34 %, walaupun pada masa itu terjadi kenaikan harga BBM yang sempat mengguncangkan perekonomian nasional dan membawa dampak yang signifikan pada perekonomian secara makro. Namun dikarenakan perekonomian Kabupaten Sragen berbasis pada sektor pertanian yang merupakan sektor primer sehingga dampak kenaikan harga BBM tidak begitu terasa. Gambaran perkembangan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2006 s/d 2010

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	52.019.759.755	65.257.982.596	65.561.025.869	72.681.309.220	79.627.347.874
	Pajak Daerah	8.859.374.692	10.454.239.235	11.958.348.473	16.248.229.466	17.659.090.382
	Retribusi Daerah	29.636.217.406	37.682.506.066	37.083.968.889	13.971.700.450	16.695.488.657
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.755.402.703	3.678.292.666	4.504.710.818	4.662.634.227	5.277.163.221
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	10.768.764.954	13.442.944.629	12.013.997.689	37.798.745.077	39.995.605.614
	% Kenaikan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun	-	25,45	0,46	10,86	9,56
	Rata-rata Kenaikan 2006 – 2010	11,58				
2.	DANA PERIMBANGAN	528.358.932.488	589.545.059.123	638.420.916.436	636.207.252.277	653.056.922.240
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	25.452.932.488	31.261.059.123	32.867.951.436	36.135.816.277	39.737.032.240
	Dana Alokasi Umum (DAU)	466.851.000.000	513.575.000.000	551.265.965.000	551.913.436.000	561.675.090.000
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	36.055.000.000	44.709.000.000	54.287.000.000	48.158.000.000	51.644.800.000
	Dana Perimbangan dari Propinsi	0	0	0	0	0
	% Kenaikan Realisasi Dana Perimbangan Tahun	-	11,58	8,29	(0,35)	2,65
	Rata-rata Kenaikan 2006 – 2010	5,54				
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	37.553.011.902	85.745.252.432	100.152.248.146	88.751.001.739	150.464.260.169
	Dana Hibah	-	-	6.710.000.000	18.696.000.000	921.900.000
	Dana Darurat	-	0,00	3.000.000.000	0,00	0
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	30.000.000.000	31.609.733.800	9.858.705.000,00	18.087.160.336
	Dana bagi Hasil pajak dari Prop	37.553.011.902	29.648.974.432	36.007.183.096	42.080.766.739	39.977.298.833
	Transfer Pemerintah Pusat	0	4.750.000.000	0	0	70.805.178.000
	Lain-lain	0	21.346.278.000	22.825.331.250	18.115.530.000	20.672.723.000
	% Kenaikan Realisasi Lain-lain Pendap Daerah Tahun	-	128,33	16,80	(11,38)	69,54
	Rata-rata Kenaikan 2006 – 2010	50,82				
	JUMLAH	617.931.704.145	740.548.294.151	804.134.190.451	797.639.563.236	883.148.530.283
	% Kenaikan Realisasi Pendapatan Tahun	-	19,84	8,59	(0,81)	10,72
	Rata-rata Kenaikan 2006 – 2010	9,59				

Sumber DPPKAD Kab. Sragen

Pendapatan Daerah terdiri dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen selama kurun waktu 2006 – 2010 terus menerus mengalami peningkatan, dimana peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2007 yaitu meningkat sebesar 25,45 persen dan peningkatan paling rendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 0,46 persen. Rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 2006 – 2010 itu adalah 11,58 persen per tahun.

Dana Perimbangan yang merupakan sumber pendapatan paling besar dibandingkan dengan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama 2006 – 2010 kecuali pada tahun 2009 yang menurun sebesar 0,35 persen. Pertumbuhan Dana Perimbangan paling besar terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 11,58 persen. Sehingga selama kurun waktu 2006 – 2010 itu rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan adalah sebesar 5,54 persen per tahun.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga sempat menurun pada tahun 2009 dengan angka penurunan sampai sebesar 11,38 persen. Namun pada tahun-tahun lain perkembangan sumber pendapatan daerah ini meningkat cukup besar, misalnya pada tahun 2007 tumbuh sebesar 128,33 persen, tahun 2010 meningkat 69,54 persen dan tahun 2008 meningkat sebesar 16,80 persen. Sehingga rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2006 – 2010 mencapai 50,82 persen per tahun.

Berdasarkan perkembangan sumber-sumber pendapatan daerah itu maka Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen mengalami perkembangan rata-rata sebesar 9,59 persen per tahun selama kurun waktu 2006 – 2010. Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen memang pernah menurun pada tahun 2009 yaitu sebesar 0,81 persen. Namun pada tahun-tahun yang lain seperti 2007, 2008 dan 2010 masing-masing Pendapatan Daerah itu meningkat sebesar 19,84 persen, 8,59 persen dan 10,72 persen. Dengan demikian perkembangan PAD di Kabupaten Sragen relatif lebih besar dari perkembangan total Pendapatan Daerah, demikian pula Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hanya pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan yang memiliki pertumbuhan rata-rata selama tahun 2006 – 2010 lebih kecil dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah.

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2006 s/d 2010

NO	URAIAN	TAHUN				
		2006	2007	2008	2009	2010
I.	BELANJA LANGSUNG TIDAK	312.016.493.414	379.419.483.204	471.584.400.196	526.847.671.039	605.951.373.398
1	Belanja Pegawai	277.412.186.191	331.994.784.088	414.465.456.794	450.934.641.089	541.202.047.820
2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
4	Belanja Hibah		22.972.090.000	4.137.120.000	25.279.445.000	4.076.895.578
5	Belanja Bantuan Sosial		21.668.820.976	21.886.645.000	18.816.297.200	31.546.461.000
6	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0
7	Belanja Bantuan Keuangan	34.548.537.223	583.788.140	30.495.178.402	31.817.287.750	29.125.969.000
8	Belanja Tidak Terduga	55.770.000	2.200.000.000	600.000.000	0	0
	<i>Prosentase Kenaikan Pertahun</i>	-	21,60	24,29	11,72	15,01
	<i>Rata-rata Kenaikan</i>	18,16				
II	BELANJA LANGSUNG	280.389.937.066	322.514.911.664	334.204.812.956	280.940.069.513	297.765.170.164
1	Belanja Pegawai	55.915.721.054	58.587.314.839	73.140.962.964	79.576.701.369	95.506.243.733
2	Belanja Barang dan Jasa	60.335.467.324	89.484.903.978	90.509.785.162	99.126.395.716	115.895.354.270
3	Belanja Modal	164.138.748.688	174.442.692.847	170.554.064.830	102.236.972.428	86.363.572.161
	<i>Prosentase Kenaikan Pertahun</i>	-	15,02	3,62	(15,94)	5,99
	<i>Rata-rata Kenaikan</i>	2,17				
	Jumlah	592.406.430.480	701.934.394.868	805.789.213.152	807.787.740.552	903.716.543.562
	Prosentase Kenaikan Pertahun	0	18,49	14,80	0,25	11,88
	Rata –rata Kenaikan	11,35				

Sumber DPPKAD Kab. Sragen

Komposisi Belanja Daerah terdiri dari kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung merupakan kelompok belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan. Sedangkan Belanja Langsung merupakan kelompok belanja yang terkait langsung dengan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan), Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan kelompok Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai (Honorarium Kegiatan), Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

Belanja Tidak Langsung di Kabupaten Sragen meningkat dari tahun ke tahun selama 2006 – 2011 dengan angka pertumbuhan rata-rata sebesar 18,16 persen per tahun. Peningkatan selama tahun 2006 – 2010 ini yang paling tinggi adalah tahun 2008 yaitu meningkat sebesar 24,29 persen dan tahun 2007 adalah sebesar 21,60 persen. Sedangkan pada tahun 2009 dan 2010 masing-masing Belanja Tidak Langsung Kabupaten Sragen meningkat sebesar 11,72 persen dan 15,01 persen.

Belanja Gaji Pegawai yang merupakan belanja paling dominan pada kelompok Belanja Tidak Langsung juga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2006 – 2010. Bahkan pertumbuhan rata-rata Belanja Pegawai yang besarnya mencapai 18,33 persen per tahun ini relatif lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan total Belanja Tidak Langsung yang hanya tumbuh rata-rata sebesar 18,16 persen.

Belanja Langsung Daerah di Kabupaten Sragen pernah mengalami penurunan pada tahun 2009 yaitu sebesar 15,94 persen. Sedangkan tahun 2008 dan 2010 masing-masing hanya meningkat sebesar 3,62 persen dan 5,99 persen. Pertumbuhan Belanja Langsung terbesar selama kurun waktu itu terjadi pada tahun 2007 yaitu mencapai 15,02 persen. Dengan demikian pertumbuhan rata-rata Belanja Langsung Daerah adalah sebesar 2,17 persen per tahun.

Berdasarkan perkembangan masing-masing kelompok Belanja Daerah itu menjadi penyumbang berkembangnya Belanja Daerah secara keseluruhan. Selama tahun 2006 – 2010 itu rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah mencapai 11,35 persen per tahun. Pertumbuhan paling besar terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 18,49 persen dan pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2009 yaitu mening at sebesar 0,25 persen.

Tabel 3.3
Rasio Realisasi Pendapatan dengan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2006 s/d 2010

NO	URAIAN	TAHUN				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Pendapatan	617.931.704.145	740.548.294.151	804.134.190.451	797.639.563.236	883.148.530.283
2	Belanja	592.406.430.480	701.934.394.868	805.789.213.152	807.787.740.552	903.716.543.562
	Prosentase Belanja terhadap Pendapatan	95,87	94,79	100,21	101,27	102,33

Sumber DPPKAD Kab. Sragen

Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2006 – 2010

URAIAN	TAHUN				
	2006	2007	2008	2009	2010
PENDAPATAN	617.931.704.145	740.548.294.151	804.134.190.451	797.639.563.236	883.148.530.283
BELANJA	592.406.430.480	701.934.394.868	805.789.213.152	807.787.740.552	903.716.543.562
SURPLUS/DEFISIT	25.525.273.665	38.613.899.283	-1.655.022.701	-10.148.177.316	-20.568.013.279
Penerimaan Pembiayaan	37.530.193.060	74.507.267.392	88.538.913.914	72.332.084.213	55.077.671.897
Pengeluaran Pembiayaan	10.025.000.000	38.434.653.761	20.007.507.000	9.694.000.000	4.732.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	27.505.193.060	36.072.613.631	68.531.406.914	62.638.084.213	50.345.671.897
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	53.030.466.725	74.686.512.914	66.876.384.213	52.489.906.897	29.777.658.618

Sumber: DPPKAD Kab. Sragen

Tabel 3.5
Asset Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 s/d 2010

URAIAN	TAHUN				
	2006	2007	2008	2009	2010
Aktiva Lancar	71.820.384.869,21	92.243.002.367,61	85.059.455.324,99	67.067.211.628,73	42.658.752.064,48
Investasi Jangka Panjang	34.832.097.954,00	54.468.644.026,00	61.222.078.226,00	66.888.994.226,00	69.440.515.201,00
Aktiva Tetap	1.146.120.113.200,00	1.324.953.322.296,00	1.387.160.377.589,57	1.492.503.644.498,57	1.602.444.046.503,57
Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Aktiva Lain	3.619.725.000,00	2.440.725.000,00	2.440.725.000,00	2.817.985.000,00	3.263.210.000,00
Total	1.256.392.321.023,21	1.474.105.693.689,61	1.535.882.636.140,56	1.629.277.835.353,30	1.717.806.523.769,05

Sumber DPPKAD Kab. Sragen

Tabel 3.6
Hutang / Kewajiban Kabupaten Sragen Tahun 2006 s/d 2010

URAIAN	TAHUN				
	2006	2007	2008	2009	2010
Kewajiban Jangka Pendek	2.673.106.558,00	6.338.509.362,00	3.873.161.138,00	1.080.406.870,67	2.413.148.526,00
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Total	2.673.106.558,00	6.338.509.362,00	3.873.161.138,00	1.080.406.870,67	2.413.148.526,00

Sumber DPPKAD Kab. Sragen

Tabel 3.7
Ekuitas Dana Kabupaten Sragen Tahun 2006 s/d 2010

URAIAN	TAHUN (Rp. 000)				
	2006	2007	2008	2009	2010
Dana Lancar	69.147.278.311,21	85.904.493.005,61	81.186.294.186,99	65.986.804.758,06	40.245.603.538,48
Dana Investasi	1.184.571.936.154,00	1.381.862.691.322,00	1.450.823.180.815,57	1.562.210.623.724,57	1.675.147.771.704,57
Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Total	1.253.719.214.465,21	1.467.767.184.327,61	1.532.009.475.002,56	1.628.197.428.482,63	1.715.393.375.243,05

Sumber DPPKAD Kab. Sragen

Tabel 3.8
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Kabupaten Sragen Tahun 2006 s/d 2010

URAIAN	TAHUN (Rp. 000)				
	2006	2007	2008	2009	2010
Total Utang dan Ekuitas Dana	1.256.392.321.023,21	1.474.105.693.689,61	1.535.882.636.140,56	1.629.277.835.353,30	1.717.806.523.769,05

Sumber DPPKAD Kab. Sragen

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2006 – 2010

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006-2010 diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber PAD berasal dari Pajak Daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan pembangunan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian lain-lain penerimaan berasal dari lain-lain penerimaan yang sah dan lain-lain penerimaan dari propinsi.

Untuk mendukung pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategik berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Secara umum, upaya peningkatan pendapatan daerah, lebih khusus diupayakan pada sumber PAD, mengingat *controlability*nya lebih tinggi dibanding sumber-sumber pendapatan yang lain. Upaya yang dilakukan meliputi :

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi

Dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Sragen. Indikator keberhasilan program ini adalah meningkatnya pendapatan daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah dan PBB.

2) Koordinasi/sinkronisasi lintas sektoral

Dimaksudkan untuk mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mendukung peningkatan pendapatan pajak daerah dari aspek pembangunan ekonomi. Program ini juga dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas rendahnya rasio elastisitas pertumbuhan

ekonomi terhadap pertumbuhan pajak daerah. Indikator keberhasilan program ini berupa peningkatan pembangunan

3) Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas keterbatasan kualitas aparatur yang berhubungan dengan upaya penggalan dan pelayanan penerimaan pendapatan daerah. Indikator keberhasilan program ini adalah peningkatan kualitas SDM aparat dalam jangka pengelolaan pajak daerah melalui penyelenggaraan pelatihan yang relevan.

3.2.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2006 – 2010

Suatu arah pengelolaan belanja daerah dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan (strategik) dapat dibiayai oleh APBD. Belanja daerah diarahkan untuk seefektif mungkin membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang terformulasikan dalam program dan kegiatan. Belanja diklasifikasi menjadi belanja aparatur, belanja publik serta belanja tidak langsung.

Pos belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja wajib yang dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja pokok pinjaman, serta belanja barang dan jasa. Selisih antara belanja wajib yang dikeluarkan merupakan dana yang dialokasikan sebagai pagu indikatif dari masing-masing SKPD.

3.2.3. Arah Pembiayaan Tahun 2006 – 2010

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah.

3.3. Kerangka Pendanaan Tahun 2011 – 2015

Keuangan daerah dalam bentuk PAD menjadi sangat strategis dan menjadi isu sentral tersendiri apalagi kondisi kapasitas dan rasionalitas APBD Kabupaten Sragen dibandingkan dengan jumlah penduduk dan tugas-tugas otonomi daerah masih sangat kecil.

3.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan

Difokuskan pada upaya penggalian PAD walaupun tetap dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membebani UMKM dan masyarakat secara berlebihan. Selain itu perlu dilakukan upaya peningkatan optimalisasi dana perimbangan termasuk bagi hasil dari propinsi serta tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Sragen.

Tahap perencanaan Pendapatan menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Oleh karena itu pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang bukan hanya mampu menjamin seluruh pendapatan daerah dapat terkumpul dan diterima di kas daerah tetapi mampu merumuskan kebijakan anggaran pendapatan daerah mulai dari proses perencanaan. Perencanaan pendapatan daerah merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan.

Oleh karenanya Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen senantiasa berupaya memaksimalkan potensi yang ada disamping terus menggali potensi yang selama ini belum tersentuh. Pemerintah daerah seringkali dihadapkan dengan masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah (*fiscal needs*) sementara kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi yang menyebabkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah baik jumlahnya maupun pengelolaannya. Disinilah

Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menciptakan satu kebijakan perencanaan pendapatan yang mampu memberi peluang untuk menambah volume penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu.

3.3.2. Arah Kebijakan Belanja

Difokuskan pada belanja untuk membiayai urusan wajib dan urusan pilihan serta pemberian stimulan maupun motivasi dalam pengembangan UMKM, pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan serta bantuan kepada organisasi kemasyarakatan yang sinergi dengan program-program pembangunan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi misi dan kebijakan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Selain itu diupayakan agar Belanja Langsung mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa

Hal yang tidak kalah penting dalam mencukupi kebutuhan pendanaan pembangunan daerah adalah dengan melakukan kemitraan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam bentuk sinergitas program dana dekonsentrasi dan hibah/bantuan langsung kepada masyarakat.

3.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah dipersiapkan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

menyebutkan bahwa pengelolaan dan/ atau pelaksanaan pembiayaan daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Secara umumnya setiap pemerintahan kabupaten/kota pada waktu menyusun rancangan APBD akan menganut "prakiraan maju" (*forward estimate*) yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dibuat lebih besar dari pada tahun berjalan agar kesinambungan program dapat lebih terjamin pelaksanaannya. Biasanya hal ini akan mengakibatkan dampak positif terhadap posisi keuangan pemerintah daerah karena adanya sisa lebih perhitungan anggaran.

Dari sisi perencanaan penganggaran tingginya angka SiLPA dan Pembiayaan Kegiatan Lanjutan dapat diartikan kurang matangnya perencanaan baik dari sisi pendapatan dan/ atau belanja sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Penganggaran yang cukup besar dan/ atau kebijakan belanja ketat yang berlebihan.

Tabel 3.9
Proyeksi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
Tahun Anggaran 2011-2016

No	Jenis Pendapatan	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	79.627.347.874	87.435.052.006	96.498.019.361	106.775.687.457	118.999.370.542	132.987.906.675	149.707.465.470
	Realisasi Kenaikan	7.807.704.132	9.062.967.355	10.277.668.096	12.223.683.085	13.988.536.133	16.719.558.794	18.821.581.853
	Rata-Rata per tahun	9,56	9,81	10,37	10,65	11,45	11,76	12,57
1	Pajak Daerah	17.659.090.382	19.191.899.427	20.919.170.376	22.801.895.709	24.968.075.802	27.340.043.003	30.074.047.303
	Realisasi Kenaikan	1.532.809.045	1.727.270.948	1.882.725.334	2.166.180.092	2.371.967.201	2.734.004.300	3.157.774.967
	Rata-Rata per tahun	8,68	9,00	9,00	9,50	9,50	10,00	10,50
2	Retribusi Daerah	16.695.488.657	19.951.108.945	23.941.330.734	28.729.596.881	34.619.164.242	41.716.092.911	50.476.472.422
	Realisasi Kenaikan	3.255.620.288	3.990.221.789	4.788.266.147	5.889.567.361	7.096.928.670	8.760.379.511	10.852.441.571
	Rata-Rata per tahun	19,50	20,00	20,00	20,50	20,50	21,00	21,50
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.277.163.221	5.972.693.334	6.779.006.934	7.694.172.870	8.771.357.071	9.999.347.061	11.449.252.385
	Realisasi Kenaikan	695.530.113	806.313.600	915.165.936	1.077.184.202	1.227.989.990	1.449.905.324	1.660.141.596
	Rata-Rata per tahun	13,18	13,50	13,50	14,00	14,00	14,50	14,50
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	39.995.605.614	42.319.350.300	44.858.511.318	47.550.021.997	50.640.773.427	53.932.423.700	57.707.693.359
	Realisasi Kenaikan	2.323.744.686	2.539.161.018	2.691.510.679	3.090.751.430	3.291.650.273	3.775.269.659	4.039.538.535
	Rata-Rata per tahun	5,81	6,00	6,00	6,50	6,50	7,00	7,00
B	DANA PERIMBANGAN	653.056.922.240	670.699.436.967	690.655.444.449	711.588.621.114	737.128.546.893	764.032.738.767	796.224.632.388
	Realisasi Kenaikan	17.642.514.727	19.956.007.481	20.933.176.665	25.539.925.779	26.904.191.874	32.191.893.621	34.433.123.926
	Rata-Rata per tahun	2,65	2,70	2,98	3,03	3,59	3,65	4,21
1	Dana Bagi hasil pajak/bukan Pajak	39.737.032.240	43.698.814.354	48.068.695.790	52.875.565.369	58.427.499.732	64.562.387.204	71.664.249.797
	Realisasi Kenaikan	3.961.782.114	4.369.881.435	4.806.869.579	5.551.934.364	6.134.887.472	7.101.862.592	8.241.388.727
	Rata-Rata per tahun	9,97	10,00	10,00	10,50	10,50	11,00	11,50

No	Jenis Pendapatan	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Dana Alokasi Umum	561.675.090.000	571.616.739.093	583.049.073.875	594.710.055.352	609.577.806.736	624.817.251.905	643.561.769.462
	Realisasi Kenaikan	9.941.649.093	11.432.334.782	11.660.981.477	14.867.751.384	15.239.445.168	18.744.517.557	19.306.853.084
	Rata-Rata per tahun	1,77	2,00	2,00	2,50	2,50	3,00	3,00
3	Dana Alokasi Khusus	51.644.800.000	55.383.883.520	59.537.674.784	64.003.000.393	69.123.240.424	74.653.099.658	80.998.613.129
	Realisasi Kenaikan	3.739.083.520	4.153.791.264	4.465.325.609	5.120.240.031	5.529.859.234	6.345.513.471	6.884.882.116
	Rata-Rata per tahun	7,24	7,50	7,50	8,00	8,00	8,50	8,50
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	150.464.260.169	170.478.353.418	178.273.780.720	187.490.434.127	197.764.296.524	209.812.443.741	223.285.508.840
	Realisasi Kenaikan	20.014.093.249	7.795.427.302	9.216.653.407	10.273.862.397	12.048.147.216	13.473.065.099	15.747.176.070
	Rata-Rata per tahun	69,54	13,30	4,57	5,17	5,48	6,09	6,42
1	Dana Hibah	921.900.000	1.014.090.000	1.115.499.000	1.227.048.900	1.355.889.035	1.498.257.383	1.655.574.408
	Realisasi Kenaikan	92.190.000	101.409.000	111.549.900	128.840.135	142.368.349	157.317.025	182.113.185
	Rata-Rata per tahun	10,00	10,00	10,00	10,50	10,50	10,50	11,00
2	Dana Darurat	0	-	-	-	-	-	-
	Realisasi Kenaikan	-	-	-	-	-	-	-
	Rata-Rata per tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Penyesuaian dan Otsus	18.087.160.336	33.182.704.352	35.505.493.657	37.990.878.213	40.840.194.079	43.903.208.635	47.415.465.326
	Realisasi Kenaikan	15.095.544.016	2.322.789.305	2.485.384.556	2.849.315.866	3.063.014.556	3.512.256.691	3.793.237.226
	Rata-Rata per tahun	83,46	7,00	7,00	7,50	7,50	8,00	8,00
4	Dana Bagi hasil pajak dari Provinsi	39.977.298.833	41.176.617.798	42.411.916.332	43.896.333.404	45.432.705.073	47.250.013.276	49.140.013.807
	Realisasi Kenaikan	1.199.318.965	1.235.298.534	1.484.417.072	1.536.371.669	1.817.308.203	1.890.000.531	2.211.300.621
	Rata-Rata per tahun	3,00	3,00	3,50	3,50	4,00	4,00	4,50

No	Jenis Pendapatan	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Transfer Pemerintah Pusat	70.805.178.000	71.513.229.780	72.228.362.078	73.311.787.509	74.411.464.322	75.899.693.608	77.417.687.480
	Realisasi Kenaikan	708.051.780	715.132.298	1.083.425.431	1.099.676.813	1.488.229.286	1.517.993.872	1.935.442.187
	Rata-Rata per tahun	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	2,00	2,50
6	Lain-lain	20.672.723.000	23.591.711.488	27.012.509.653	31.064.386.101	35.724.044.016	41.261.270.839	47.656.767.819
	Realisasi Kenaikan	2.918.988.488	3.420.798.166	4.051.876.448	4.659.657.915	5.537.226.823	6.395.496.980	7.625.082.851
	Rata-Rata per tahun	14,12	14,50	15,00	15,00	15,50	15,50	16,00
	TOTAL PENDAPATAN	883.148.530.283	928.612.842.391	965.427.244.530	1.005.854.742.698	1.053.892.213.959	1.106.833.089.183	1.169.217.606.697
	Realisasi Kenaikan	45.464.312.108	36.814.402.139	40.427.498.168	48.037.471.261	52.940.875.224	62.384.517.514	69.001.881.849
	Rata-Rata per tahun	10,72	5,15	3,96	4,19	4,78	5,02	5,64

Tabel 3.10
Proyeksi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sragen
Tahun Anggaran 2010-2016

No	URAIAN	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDAPATAN	883.148.530.283	928.612.842.391	965.427.244.530	1.005.854.742.698	1.053.892.213.959	1.106.833.089.183	1.169.217.606.697
2	TOTAL BELANJA = A + B	903.716.543.562	1.052.428.225.284	1.208.099.407.352	1.387.239.026.797	1.604.278.172.676	1.868.795.657.387	2.193.783.507.944
	Kenaikan per tahun	148.711.681.722	155.671.182.068	179.139.619.445	217.039.145.879	264.517.484.711	324.987.850.557	384.640.275.454
	Rata-rata kenaikan	12,27	16,46	14,79	14,83	15,65	16,49	17,39
	DEFISIT	(20.568.013.279)	(123.815.382.893)	(242.672.162.822)	(381.384.284.099)	(550.385.958.717)	(761.962.568.204)	(1.024.565.901.247)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	605.951.373.398	724.886.538.104	831.426.467.095	954.065.145.501	1.095.298.862.153	1.258.020.484.760	1.445.583.921.475
	Kenaikan per tahun	118.935.164.706	106.539.928.991	122.638.678.407	141.233.716.652	162.721.622.607	187.563.436.715	216.295.368.499
	Rata-rata kenaikan	15,01	19,63	14,70	14,75	14,80	14,86	14,91
	PROSENTIS TOTAL BELANJA	67,05	68,88	68,82	68,77	68,27	67,32	65,89
1	Belanja Pegawai (Gaji)	541.202.047.820	649.550.697.794	743.735.548.974	851.949.071.349	976.333.635.766	1.119.366.513.406	1.283.913.390.877
	Kenaikan per tahun	108.348.649.974	94.184.851.180	108.213.522.376	124.384.564.417	143.032.877.640	164.546.877.471	189.377.225.154
	Rata-rata kenaikan	20,02	14,50	14,55	14,60	14,65	14,70	14,75
2	Belanja Tidak Langsung Lainnya	64.749.325.578	75.335.840.310	87.690.918.121	102.116.074.152	118.965.226.387	138.653.971.354	161.670.530.598
	Kenaikan per tahun	10.586.514.732	12.355.077.811	14.425.156.031	16.849.152.235	19.688.744.967	23.016.559.245	26.918.143.345
	Rata-rata kenaikan	16,35	16,40	16,45	16,50	16,55	16,60	16,65
B	BELANJA LANGSUNG	297.765.170.164	327.541.687.180	376.672.940.257	433.173.881.296	508.979.310.523	610.775.172.627	748.199.586.469
	Kenaikan per tahun	29.776.517.016	49.131.253.077	56.500.941.039	75.805.429.227	101.795.862.105	137.424.413.841	168.344.906.955
	Rata-rata kenaikan	10,00	15,00	15,00	17,50	20,00	22,50	22,50
	PROSENTIS TOTAL BELANJA	32,95	31,12	31,18	31,23	31,73	32,68	34,11

